

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai bagaimana pengaruh dari peran KPU Kota Depok dalam mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 memiliki pengaruh. Hipotesis yang terdapat pada penelitian ini, dimana peran KPU sebagai lembaga pemerintah dapat mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas dengan berlandaskan teori partisipasi politik Nimmo, yakni seseorang cenderung berpartisipasi dalam politik apabila memiliki tiga faktor utama yaitu peluang resmi, sumber daya sosial, dan motivasi personal terbukti benar. Hal ini dapat dibuktikan melalui uji signifikansi dan uji regresi linear sederhana yang dimana menghasilkan kesimpulan bahwa Hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Yang artinya variabel independen yakni Peran KPU mempengaruhi variabel dependen yakni partisipasi politik penyandang disabilitas.

Selain itu, peneliti juga melakukan analisis berdasarkan kerangka berpikir dan teori yang sudah digunakan dalam penelitian ini dimana Peran KPU yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas.

Pertama, apabila melihat peran KPU melalui teori partisipasi politik nimmo dengan melihat dimensi peluang resmi, sumber daya sosial dan motivasi personal. Ketiga dimensi ini merupakan satu kesatuan yang menunjukkan tujuan akhir. Yakni masyarakat mau ikut serta untuk berpartisipasi politik. Dimana KPU membuat kegiatan atau program untuk melakukan sosialisasi politik dan penyediaan aksesibilitas mengenai pilkada yang dimana termasuk ke dalam dimensi Peluang Resmi, tentunya sosialisasi ini harus menghadirkan masyarakat difabel agar mereka dapat mengetahui informasi pendidikan politik yang diberikan, hal ini termasuk ke dalam sumber daya sosial. Dengan terpenuhinya dimensi peluang resmi dan sumber daya sosial tentunya kesadaran politik masyarakat akan meningkat, apalagi aksesibilitas yang merupakan hak penyandang disabilitas terpenuhi.

Kedua, dari hasil penelitian dapat dilihat bahwasannya masih cukup banyak pemilih yang merasa tidak setuju bahwa fasilitas yang disediakan oleh KPU Kota Depok sudah mereka rasakan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan fasilitas dan sosialisasi politik yang disediakan tidak menyebar secara menyeluruh masyarakat.

Walaupun begitu, pemilih penyandang disabilitas tetap memiliki kesadaran politik untuk memberikan hak suaranya pada saat Pilkada Depok 2024.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KPU memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya secara adil dan setara dalam Pilkada. Langkah-langkah yang dilakukan KPU, seperti menyediakan akses informasi yang ramah disabilitas, pelatihan pemilih disabilitas, pendampingan saat pemungutan suara, dan penyediaan fasilitas yang aksesibel dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, dan rasa keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses politik. Ketika penyandang disabilitas merasa diperhatikan dan difasilitasi secara adil, mereka akan lebih sadar akan hak-hak politiknya dan terdorong untuk berpartisipasi.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Praktis**

Berdasarkan dari hasil temuan dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan saran ini ditujukan bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan, lembaga-lembaga yang mengurus kegiatan Pemilihan Umum seperti KPU dan Bawaslu, dan juga masyarakat. Pertama, lebih membuat agenda kegiatan pemilu lebih inklusif lagi terhadap masyarakat yang tergolong pada kelompok rentan seperti mengadakan sosialisasi-sosialisasi, *forum grup discussions* dan sebagainya dengan para komunitas masyarakat penyandang disabilitas agar mendapatkan *insight* dari sudut pandang para disabilitas. Kedua, mengupayakan pemerataan fasilitas TPS yang ramah difabel. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, dimana tidak semua TPS memiliki fasilitas ramah difabel, sehingga dapat terjadi kesenjangan fasilitas antar TPS-TPS yang ada. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan pengecekan skala berkala TPS yang ada dengan menggunakan indikator penilaian fasilitas yang sudah disepakati. Ketiga, masyarakat juga ikut serta dalam meningkatkan upaya-upaya pemerataan fasilitas, seperti mengkritik fasilitas-fasilitas yang masih kurang sebagai masukan untuk lembaga pemerintah.

### **5.2.2 Saran Teoritis**

Penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif. Oleh karena itu, apabila ingin melakukan penelitian yang serupa, disarankan untuk melakukan

*research mix-method*. Hal ini dapat dilakukan agar hasil penelitian dari olah data dapat diperkuat dan dijelaskan sebab dan akibat yang didapatkan dari hasil wawancara sehingga menghasilkan gambaran hasil penelitian yang lebih luas mengenai bagaimana peran KPU dalam mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas. Wawancara bisa dilakukan dengan anggota KPU dan komunitas penyandang disabilitas terkait. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa memang KPU Kota Depok sudah memberikan peluang dan sumber daya sosial, akan tetapi, hal tersebut masih kurang merata dalam memfasilitasi seluruh masyarakat penyandang disabilitas. Maka, motivasi personal dari para difabel masih menjadi alasan yang paling kuat masyarakat mau tetap memberikan hal suaranya dengan segala keterbatasan yang disediakan. Hal ini dapat digali lebih lanjut melalui wawancara individu, maka dengan itu penelitian *mix-method* disarankan untuk penelitian selanjutnya.